



DIPURA - TPA Sente dinilai sudah tak layak. Kondisi TPA Sente menjadi salah satu faktor rendahnya penilaian dalam perebutan trofi adipura di Klungkung. Bali Post/kmb31

70 Persen Sampah Tak Tertangani

PENANGANAN sampah tampaknya masih menjadi masalah serius bagi Klungkung. Saat ini, 70 persen volume sampah tidak tertangani. Berdasarkan Data DKP Klungkung, tahun 2014 produksi sampah mencapai 170.170,89 meter kubik. Dari jumlah ini hanya bisa ditangani DKP Klungkung 48.245,8 meter kubik atau 28,35 persen. Artinya, lebih dari 70 persen sampah di Kabupaten Klungkung belum tersentuh penanganan. Produksi sampah terbesar ada di Kecamatan Klungkung di antaranya Kota

diubah dalam upaya merebut trofi adipura. Sebagai Ketua Koordinasi Lomba Adipura, setelah mendapat pemaparan dari Tim Penilai Lomba, pemerintah daerah harus bisa memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk berbenah.

Ketua Tim Monitoring I Made Dwi Arbani, Senin (23/3) kemarin, menyampaikan selama pemantauan di lapangan, pihaknya menemukan berbagai faktor yang membuat nilai kebersihan Kota Semarapura turun. Masalah yang paling prinsip adalah penanganan

Semarapura sekitar 146 meter kubik per hari.

Kecilnya volume sampah yang tertangani akibat terbatasnya tenaga kebersihan. DKP mempekerjakan 87 orang tenaga kebersihan, 16 sopir dan 46 orang petugas truk. Kondisi ini juga tak didukung sarana dan prasarana. DKP mengoperasikan 14 unit truk, mobil *pick-up* satu unit, gerobak 21 unit dan alat-alat lainnya.

Pelaksana tugas (Plt.) Sekda Klungkung, Senin (23/3) kemarin mengakui, banyak yang harus

sampah. Setidaknya, hal itu paling nampak dari kondisi TPA Sente yang sudah *overload*. Ia meminta SKPD terkait melakukan perubahan dan perbaikan.

Mantan Bupati Klungkung Tjokorda Gde Ngurah menyarankan pemerintah daerah bersama legislatif memikirkan serius reneana membuat TPA baru. Masyarakat Banjar Sente Desa Pikat, Kecamatan Dawan, sudah tak tahan lagi bertetangga dengan TPA Sente yang sejak lama sudah *overload*.

Ia menilai kegagalan Klung-

kung meraih trofi adipura tahun lalu, tidak terlepas dari ketidakmampuan Klungkung menangani sampah. Terutama dalam penyediaan TPA yang layak. Jika ini belum tertangani, adipura tahun ini juga bisa dipastikan gagal lagi.

Luas TPA Sente hanya 0,98 hektar dan sudah beroperasi sejak tahun 1994 atau 21 tahun, sudah sewajarnya ditutup. Ia meminta Pemkab dan DPRD serius bersinergi untuk pengadaan sebuah TPA baru yang benar-benar representatif dengan luas minimal 4 hektar. (gik)

Edisi : selasa, 24 Maret 2015

Hal : 16



Larangan PNS Rapat di Hotel

Hemat Uang Negara

Rp 5,122 Triliun

Denpasar (Bali Post) -

Larangan bagi PNS rapat di hotel rupanya menghemat uang negara hingga Rp 5,122 triliun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Yuddi Chrisnandi mengatakan, penghematan ini dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah. Misalnya untuk menambah distribusi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, membangun saluran irigasi baru bagi program penguatan ketahanan pangan, serta dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus bagi perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.

"Dalam waktu dua bulan yang dievaluasi oleh BPK itu, sejak peraturan diterbitkan untuk November dan Desember saja berhasil menghemat Rp 5,122 triliun karena pemerintah membatasi atau bahkan menghentikan rapat-rapat di luar gedung pemerintah. Jadi penghematannya sangat signifikan," ujar Yuddi usai bertemu dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Senin (23/3) kemarin.

Meski demikian, kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan seminar, simposium, atau sosialisasi undang-

undang boleh dilaksanakan di luar kantor pemerintah dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran. "Mau tiga hari atau tiga minggu di hotel itu sesuatu yang bagus mendorong industri MICE berkembang. Itu sesuatu yang positif, tetapi jangan menggunakan uang pemerintah secara berlebihan. Artinya prinsip-prinsip efisiensi harus dilakukan," jelasnya.

Di sisi lain, Yuddi mengaku sempat menerima komplain dari pengusaha hotel karena larangan PNS rapat di hotel berdampak pada penurunan omzet, penurunan kegiatan,

hingga potensi PHK bagi pegawai. Menurutnya, ini hanyalah dampak sementara karena hotel-hotel juga harus fokus kepada penguatan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata.

"Pemerintah tetap memperhatikan bagaimana hotel-hotel itu tumbuh. Oleh karena itu, anggaran pariwisata yang awalnya tahun lalu sekitar Rp 400 miliar, ditingkatkan di atas Rp 1 triliun supaya meng-*attract* wisatawan-wisatawan mancanegara untuk meningkatkan aktivitas di industri pariwisata dan perhotelan," ujarnya.

Pemerintah, kata Yuddi, juga mengambil kebijakan untuk menghapuskan biaya fiskal, bebas masuk 45 negara untuk meningkatkan kapasitas kunjungan turis mancanegara. Dengan demikian, kunjungan ke destinasi pariwisata seperti Bali dan NTB pasti akan meningkat. Terlebih bagi Bali yang tidak mengandalkan pendapatan asli daerah untuk menghidupi sektor pariwisata. Dengan demikian, kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan bagi Pulau Dewata.

"Bali ini sudah memiliki potensi wisata budaya, potensi wisata religi, potensi wisata alam, potensi wisata beragam yang merupakan daya tarik tersendiri, sehingga hotel-hotel itu tumbuh karena keindahan Bali, bukan karena adanya kebijakan pemerintah yang menggunakan hotel-hotel di Bali," tandasnya. (kmb32)

Edisi : selasa, 24 Maret 2015

Hal : 4



PASAR - Suasana sepi dan hanya tampak motor melintas di areal Pasar Banyuasri, Senin (23/3) kemarin.

Bali Post/dgk

Revitalisasi Pasar Banyuasri Diperkirakan Telan Dana Rp 40 Miliar

Singaraja (Bali Post) -

Penataan Pasar Banyuasri, Buleleng direncanakan 2016 mendatang. Anggaran yang disediakan pun cukup besar, yakni Rp 40 miliar. Setelah penataan selesai, diterapkan satu *shift* untuk pedagang.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, Senin (23/3) kemarin, mengatakan, Pasar Banyuasri memiliki peranan penting di dalam peningkatan perekonomian masyarakat di beberapa kecamatan di Buleleng. Berbagai komoditas pertanian dan perkebunan, dijual pedagang kepada pembeli di kawasan perkotaan Buleleng. Pihaknya menilai Pasar Banyuasri

layak untuk ditata kembali, khususnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap sejumlah pedagang di kawasan dalam Pasar Banyuasri. "Seluruh objek pembangunan rehab Pasar Banyuasri itu akan kami anggarkan pada tahun 2016 mendatang. Besaran anggaran kami perkirakan mencapai Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar. Kami masih pikirkan dan bila memungkinkan akan memakai satu *shift* pedagang berjualan, supaya tidak ada ribut-ribut lagi," ujarnya.

Pihaknya menilai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buleleng akan tetap terintegrasi dari tingkat pedesaan. Pembangunan

berlanjut kemudian di tingkat perkotaan, selain jalan-jalan utama, pembenahan melalui revitalisasi pasar tetap menjadi sasaran pada masa pemerintahannya saat ini. Penataan Pasar Banyuasri, salah satunya dipilih melalui observasi lingkungan lahan yang lebih luas dibandingkan Pasar Anyar. "Konsep pembangunan terintegrasi. Kami mulai dari infrastruktur di pedesaan dilanjutkan di perkotaan. Salah satunya tahun depan, kami akan melakukan proses revitalisasi Pasar Banyuasri, yang tadinya mau direvitalisasi adalah Pasar Anyar. Ini karena lahan lebih luas, jadi kami memilih Pasar Banyuasri," ucap Bupati Suradnyana.

Sementara itu, puluhan pedagang di pinggiran trotoar dan di sisi badan jalan di lingkungan Pasar Anyar, sebagian rencananya akan dipindahkan menuju Pasar Banyuasri. Pemandangan dimaksud akan terealisasi apabila penataan infrastruktur dan *shift* berjualan pedagang di Pasar Banyuasri telah berjalan optimal. "Ke depan setiap pedagang di Pasar Anyar, yang tidak mendapatkan kios di luar (trotoar jalan dan pinggiran jalan -red), maka akan kami kelompokkan langsung di kawasan Pasar Banyuasri dan ini turut menjaga penataan wajah Kota Singaraja," tandasnya. (kmb34)

Edisi : Salasa, 24 Maret 2014

Hal : 12



Tak Setor SPJ Tak Dapat ADD

Sejumlah Desa Teracam



Pasek Lanang Sadia

Bali Post/ina

Bangli (Bali Post) -

Sejumlah desa terancam tak mendapat alokasi dana desa (ADD) lantaran hingga memasuki akhir bulan ketiga tahun ini masih belum menyetorkan surat pertanggungjawaban (SPJ) dana ADD tahun 2014 ke Pemkab. Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pasek Lanang Sadia saat dikonfirmasi, Senin (23/3) kemarin, tidak menampik hal tersebut. Dia mengakui hingga menjelang akhir Maret ini masih ada beberapa desa yang belum menyerahkan SPJ penggunaan ADD tahun 2014.

Hanya, Lanang Sadia tak menyebutkan nama-nama desa yang dimaksud. "Ya sampai saat ini memang masih banyak desa yang belum setor SPJ," terangnya. Menurut pejabat asal Gianyar ini, salah satu hal yang menjadi kendala banyak desa belum menyetorkan SPJ ADD adalah faktor SDM. Dimana kemampuan SDM yang ada di desa diakuinya masih kurang sehingga kerap kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. "Faktor SDM yang mengakibatkan lambat," terangnya.

Tak hanya menyebabkan

kesulitan dalam menyusun laporan, terbatasnya kemampuan SDM di desa juga diakuinya mengakibatkan dana ADD yang selama ini digelontor Pemkab belum mampu diserap maksimal. Sejumlah dana ada yang terpaksa dikembalikan ke kas daerah dan menjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa)).

Oleh karenanya, Lanang Sadia memandang bimtek terhadap aparat desa yang akan mengelola maupun membuat laporan pertanggungjawaban ADD yang nilainya mencapai miliaran rupiah harus ditingkat-

kan. Pihaknya juga telah mengimbau kepada pihak desa untuk menganggarkan bimtek, dengan mengundang narasumber. Terkait masih adanya desa yang belum menyetor SPJ, Pemkab saat ini masih memberikan batas waktu kepada seluruh desa hingga 15 April 2015 mendatang. Jika setelah tanggal itu desa masih telat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, maka konsekuensi yang harus diterima desa adalah tidak kebagian dana ADD. APBDes yang disusun oleh desa akan hangus tidak bisa dicairkan. (kmb40)

Edisi : Selasa, 24 Maret 2015

Hal : 10



Bali Post/kmb16

DI RS - Men-PAN RB Yuddy Chrisnandi saat mengunjungi RS Gianyar, Senin (23/3) kemarin.

Ubah "Mindset" Priyayi Jadi Birokrasi Melayani Masyarakat

Gianyar (Bali Post) -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Yuddy Chrisnandi mengharapkan *mindset* birokrasi priyayi yang selama ini masih ada di setiap daerah, khususnya di Kabupaten Gianyar agar diubah menjadi birokrasi yang melayani masyarakat. Hal ini untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam hal reformasi birokrasi.

Hal itu diungkapkan Men-PAN RB Yuddy Chrisnandi di Gianyar di sela-sela mengunjungi pelayanan publik di Kantor BPPT Kabupaten Gianyar, Senin (23/3) kemarin. Di Gianyar, Men-PAN RB juga mengunjungi pelayanan publik yang ada di Polres Gianyar, RS Sanjiwani, Kantor Samsat, BPN Gianyar, dan bertatap muka dengan pegawai di lingkungan Pemkab Gianyar berkaitan dengan ASN. Men-PAN RB dalam kunjungannya didampingi Bupati Gianyar beserta jajaran terkait.

Menurutnya, selama blusukannya di Bali, hampir semua

tempat yang dikunjungi sebagian besar pelayanan publiknya sudah baik. Hal ini tentu karena didukung oleh nilai kearifan lokal masyarakat Bali, yang toleran, ramah, dan mau melayani. Sehingga kebijakan pemerintah pusat dalam hal reformasi birokrasi mengubah *mindset*, dari birokrasi yang priyayi ke birokrasi yang melayani rakyat tentu tidak sulit di Bali. Perilaku masyarakat Bali secara umum juga sudah biasa melayani orang lain sehingga tidak susah. "Tinggal pelihara dan tingkatkan, serta sarana dan prasarana fasilitas pelayanan diperbaiki sehingga bisa lebih baik lagi," katanya.

Di samping pelayanan, Men-PAN RB juga mengingatkan, pengembangan ekonomi suatu masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa besar sebuah pemerintahan daerah mengembangkan kreativitas ekonomi kreatif. Potensi ekonomi masyarakat di Kabupaten Gianyar sangat tak terbatas apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi kegiatan

yang bernilai ekonomis. Tugas aparatur pemerintah adalah bagaimana membantu masyarakat mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. "Salah satu cara yang termudah adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan memberikan kemudahan perizinan usaha," tegasnya.

Dalam bidang pembangunan, aparatur negara di Gianyar agar seantiasa berorientasi pada kelestarian alam. Ekonomi boleh berkembang namun harus dipastikan setiap pembangunan tidak mengganggu kelestarian alam, adat istiadat, tradisi, budaya yang ada di Kabupaten Gianyar.

Sementara itu, Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata mengatakan, kedatangan Men-PAN RB ke Kabupaten Gianyar akan menjadi spirit dan motivasi untuk memacu pembenahan tata kelola birokrasi sesuai dengan agenda reformasi birokrasi untuk terwujudnya *good governance*. (kmb16)

Edisi : Selasa, 24 Maret 2014

Hal : 11